

STRATEGI DAN TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Dewi Kodriyah¹, Firyaaal Faadhilah², Mia nurmalia³, Mustofa Aqil⁴, Gama Pratama⁵
Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Cirebon, Indonesia
dewikodriyah54@gmail.com, firyaallfaa25@gmail.com, mianurmalia465@gmail.com,
ghoiruaqil@gmail.com, gamapratama0@gmail.com

Abstract

Economic growth is a primary goal of development and is influenced by various macroeconomic factors, such as fiscal and monetary policy. This study aims to analyze strategies and theories of economic growth by examining the roles of these two policies in promoting stability and increasing national output. The method used is descriptive qualitative research based on secondary data obtained from scientific journals, official institutional reports, and previous studies. The findings show that fiscal policy, through the management of government spending and taxation, significantly contributes to economic growth, especially when directed toward productive sectors, as demonstrated by Purwiyanti and Panjawa (2022). Meanwhile, monetary policy plays an essential role in maintaining macroeconomic stability by controlling inflation and interest rates; according to Gil (2023), this can influence capital accumulation within the framework of endogenous growth theory. Other studies, such as those by Golpe, Leiva-León, and Moral-Benito (2023), emphasize that the synergy between fiscal and monetary policies is a crucial factor in achieving sustainable long-term economic growth. Based on literature analysis, this study concludes that effective growth strategies must incorporate economic growth theories with flexible, measurable, and adaptive fiscal and monetary policies aligned with a country's structural conditions. The results of this study are expected to serve as a theoretical foundation and offer practical insights for policymakers in designing development strategies.

Keywords: *Economic Growth, Fiscal Policy, Monetary Policy*

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi adalah tujuan utama dalam pembangunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan teori pertumbuhan ekonomi dengan melihat peran kedua kebijakan tersebut dalam mendorong stabilitas dan peningkatan produksi nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, serta hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, melalui pengelolaan belanja pemerintah dan pajak, berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika fokusnya pada sektor-sektor yang produktif, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Purwiyanti dan Panjawa (2022). Sementara itu, kebijakan moneter berperan dalam menjaga stabilitas

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

makroekonomi dengan mengendalikan inflasi dan suku bunga, hal ini menurut Gil (2023) dapat memengaruhi penimbunan modal dalam kerangka teori pertumbuhan endogen. Penelitian lain, seperti oleh Golpe, Leiva-León, dan Moral-Benito (2023), menegaskan bahwa sinergi kebijakan fiskal dan moneter adalah faktor penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis literatur, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pertumbuhan yang efektif harus mempertimbangkan penggabungan teori pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, terukur, dan mampu beradaptasi dengan kondisi struktural suatu negara. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar teoretis sekaligus memberikan manfaat praktis dalam menyusun kebijakan pembangunan.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting dalam pembangunan sebuah negara, karena peningkatan produksi nasional secara langsung memengaruhi kesejahteraan rakyat dan kemampuan negara dalam mengumpulkan pendapatan. Menurut Purwiyanti dan Panjawa (2022), kebijakan moneter dan fiskal bekerja bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mereka menemukan bahwa faktor-faktor seperti pengeluaran pemerintah, pajak, suku bunga, serta jumlah uang yang beredar memainkan peran penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah elemen krusial dalam pembangunan negara, karena kenaikan output nasional secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kapasitas fiskal negara. Menurut Purwiyanti & Panjawa (2022), kebijakan moneter dan fiskal secara simultan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mereka menemukan bahwa variabel seperti pengeluaran pemerintah dan pajak (fiskal), serta suku bunga dan jumlah uang beredar (moneter), menjadi determinan penting pertumbuhan. (Purwiyanti & Panjawa, 2022)

Dalam ranah teori ekonomi, berbagai cara mempelajari pertumbuhan ekonomi telah dibuat untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel makro dan kebijakan pemerintah. Teori neoklasik memfokuskan pada pentingnya membangun modal, menabung, dan meningkatkan produktivitas sebagai hal utama yang mendorong pertumbuhan jangka panjang. Sementara itu, teori pertumbuhan endogen lebih menekankan peran inovasi, pengumpulan pengetahuan, serta kebijakan dan lembaga sebagai faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan..

Secara sesuai dengan teori-teori itu, penelitian terkini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter bisa saling membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya, dalam penelitiannya, Putra dan Wahyudi (2024) menemukan bahwa kebijakan fiskal, seperti pengaturan anggaran, pajak, dan subsidi, memberikan dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Namun, mereka juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran negara yang efisien serta transparansi dalam menggunakan dana pemerintah. (E, 2024)

Selain itu, Ach Hakiki, Suhaemi dkk. (2024) menunjukkan bahwa inflasi yang terkendali, sebagai hasil dari kerja sama kebijakan moneter dan fiskal, membantu menciptakan iklim ekonomi yang lebih mendukung pertumbuhan. Penelitian seperti ini menegaskan bahwa pembuatan kebijakan

makroekonomi tidak bisa dipisahkan dari kerangka teori pertumbuhan; teori pertumbuhan ekonomi bukan hanya sesuatu yang abstrak, tetapi juga dasar penting dalam merancang strategi kebijakan fiskal dan moneter. (Hakiki1 et al., 2024).

Namun, tantangan tetap ada. Meskipun kebijakan fiskal yang luas bisa memberikan dorongan, masalah utang pemerintah dan cara penggunaan anggaran yang tidak efisien bisa menghambat kemajuan jika tidak dikelola dengan tepat. Dari sisi moneter, pengendalian melalui alat seperti suku bunga dan jumlah uang beredar juga memiliki batasan, terutama dalam kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Penelitian sebelumnya (Purwiyanti & Panjawa, 2022; Putra & Wahyudi, 2024) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan moneter bisa berubah-ubah dan tidak selalu konsisten, tergantung pada kondisi dasar perekonomian. (Purwiyanti & Panjawa, 2022)

Oleh karena itu, penting mencari strategi pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada teori-teori pertumbuhan klasik dan modern, serta diterapkan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel dan saling mendukung. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk meneliti dan mengevaluasi bagaimana teori pertumbuhan ekonomi dapat digabungkan dalam kebijakan fiskal dan moneter agar menghasilkan strategi yang efektif untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono, “pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan Output per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Ada tiga aspek yang menjadi fokus yaitu proses, Output per kapita, dan jangka panjang. Di sini, kita bisa melihat sisi dinamis dari perekonomian. Jadi, “pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kemajuan dari perubahan dalam perekonomian suatu negara. Dari satu periode ke periode lain, kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa akan mengalami peningkatan. Peningkatan kemampuan ini terjadi karena adanya pertambahan pada faktor-faktor produksi, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Investasi akan menambah jumlah modal barang, dan teknologi yang digunakan juga semakin maju. Selain itu, jumlah tenaga kerja meningkat karena pertumbuhan populasi disertai dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan mereka. (li & Pustaka, 2011)

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ekonomi klasik merupakan satu bentuk pemikiran yang membahas kondisi perekonomian yang sangat dipengaruhi oleh situasi sosial pada waktu itu. Pemikiran yang dimiliki oleh Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus menunjukkan bahwa para intelektual dari aliran ini memiliki pandangan yang luas mengenai aktivitas ekonomi dalam masyarakat.

Teori ekonomi klasik muncul sebagai hasil kombinasi dari analisis yang dilakukan oleh Karl Marx, yang meramalkan runtuhnya sistem kapitalisme dengan berpijak pada teori nilai kerja dan tingkat upah. Meskipun sering terjadi perbedaan pendapat mengenai satu isu tertentu, secara umum, para ekonom dari aliran ini memiliki beberapa pandangan yang serupa mengenai struktur ekonomi masyarakat, yaitu:

1. Kebijakan pasar bebas (*laissez faire*) dianggap sebagai "esensi" dari sistem perekonomian, sehingga setiap individu dan unit usaha perlu diberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi mereka.
2. Aktivitas ekonomi yang berlandaskan mekanisme pasar akan memberikan manfaat jauh lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan dibandingkan jika pemerintah ikut campur

di dalamnya. Peran pemerintah sebaiknya dibatasi pada sektor hukum, pertahanan, pendidikan, dan penyediaan layanan publik lainnya.

3. Terdapat mekanisme tarik-menarik antara permintaan dan penawaran di pasar. Menurut pandangan klasik, ada tiga syarat mutlak yang diperlukan untuk mencapai keselarasan dalam kehidupan ekonomi dan kesejahteraan umum, yaitu spesialisasi, efisiensi, dan pasar bebas.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith

Menurut Adam Smith, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan output. Pemikiran ekonomi dari Adam Smith telah ada sejak abad ke-15, ketika revolusi pertanian berlangsung di Eropa. Namun, pengakuan atas ilmu ekonomi sebagai disiplin spesifik mulai muncul pada abad ke-18, seiring terbitnya bukunya berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* pada tahun 1776. Setelah itu, fokus pemikirannya lebih banyak diarahkan pada isu-isu ekonomi. Hal ini terlihat dalam dua karya utamanya yang berjudul *Theory of Moral Sentiments*, diterbitkan tahun 1759, dan *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, yang diterbitkan pada 1776.

Di dalam karyanya, *Theory of Moral Sentiments*, yang ditulis pada tahun 1759, Smith membahas perilaku etis yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Dalam buku ini, Smith juga mengemukakan konsep yang kemudian diperdalam oleh Freud pada abad ke-20, yakni tentang ego dan super ego. Secara umum, gagasan utama buku ini mencakup tatanan alam, harmoni alami, dan sistem alam. Penulisan *Theory of Moral Sentiments* dimulai setelah Smith diangkat sebagai anggota dewan filsafat moral di University of Glasgow pada tahun 1752. Sejak saat itu, Smith mulai menjelajahi bidang filosofi moral. Melalui buku ini, publik pada waktu itu mulai tertarik pada sosok Smith. Smith berpendapat bahwa pengembangan hak milik, spesialisasi, dan pembagian kerja merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi secara historis. Dia juga membagi sejarah peradaban manusia menjadi empat tahap, yaitu:

1. Tahap berburu. Dalam tahap ini, tidak ada hak milik yang eksklusif. Semua anggota masyarakat memiliki posisi yang setara, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial, dan hanya sedikit struktur formal, karena mereka hidup secara nomaden.
2. Tahap penggembalaan. Struktur masyarakat pada tahap ini mirip dengan tahap berburu, namun hak milik dan akumulasi kekayaan mulai diperluas. Pada tahap ini, Smith menekankan pentingnya peran para penggembala.
3. Tahap pertanian. Pada tahap ini, beberapa ciri kehidupan muncul, seperti ketersediaan makanan yang lebih stabil, peningkatan spesialisasi, dan populasi yang lebih besar. Umumnya, masyarakat dalam tahap ini mulai menetap di lokasi tertentu.
4. Tahap perdagangan. Tahap ini ditandai dengan pertumbuhan cepat kota-kota dan pusat perdagangan. Smith menambahkan bahwa seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat, masyarakat akan berpindah dari bentuk masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang bersifat kapitalis.

C. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi NeoKlasik mulai muncul pada tahun 1950-an. Teori ini merujuk pada cara analisis pertumbuhan ekonomi yang berasal dari pandangan ekonomi Klasik. Dua ekonom yang berperan penting dalam pengembangan teori ini adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Menurut konsep Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi bergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi seperti populasi, angkatan kerja, dan akumulasi modal, serta tingkat kemajuan teknologi. Penelitian oleh Solow pada tahun 1956 menunjukkan bahwa kemajuan teknologi memiliki peran yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi. Solow menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, yang berada pada 2,75 persen per tahun antara

1909 dan 1949, lebih dari separuhnya, yaitu 1,5 persen, berasal dari teknologi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh peningkatan dalam penyediaan faktor-faktor produksi seperti populasi, tenaga kerja, dan akumulasi modal, serta kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada asumsi analisis ekonomi Klasik, yang menyatakan bahwa ekonomi beroperasi pada tingkat pekerjaan penuh dan pemanfaatan penuh dari faktor-faktor produksi. Selanjutnya, dalam teori ini, rasio modal terhadap output dapat berubah. Hal ini memungkinkan untuk menghasilkan output tertentu dengan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda. Jika modal digunakan lebih banyak, tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan besar. Maka, perekonomian memiliki fleksibilitas yang luas dalam memilih kombinasi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) yang diperlukan untuk mencapai tingkat output tertentu.

D. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar muncul berkat dua ekonom setelah Keynes, yakni Roy F Harrod dan Evsey D. Domar. Harrod mengemukakan teori ini untuk pertama kalinya pada tahun 1939 di *Economic Journal* dengan judul *An Essay on Dynamic Theory*. Sementara itu, Domar menyampaikan teorinya pada tahun 1947 di *American Economic Review* dengan judul *Expansion and Employment*. Meskipun kedua ekonom tersebut mengembangkan teori ini secara terpisah, mereka kini dikenal bersama sebagai teori Harrod-Domar karena inti pemikiran mereka yang serupa.

Pandangan mereka tentang pertumbuhan ekonomi menyoroti pentingnya modal dalam memperkuat ekonomi. Aspek-aspek seperti kecenderungan konsumsi (MPC) dan perbandingan modal (COR) sangat mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Teori Harrod-Domar memperlihatkan bahwa investasi bukan hanya sekadar pengeluaran, melainkan juga berkontribusi pada kemampuan suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa serta meningkatkan permintaan masyarakat. Teori ini menekankan suatu hal yang sering diabaikan oleh Keynes; jika ada investasi modal dalam periode tertentu, perekonomian di masa mendatang akan memiliki potensi yang lebih besar untuk menghasilkan barang dan jasa. Meskipun demikian, teori ini sejalan dengan Keynes dalam hal bahwa peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan nasional bergantung pada tingginya pengeluaran masyarakat. Oleh sebab itu, produksi baru akan meningkat dan pendapatan nasional akan naik ketika pengeluaran masyarakat bertambah. (Sirly, 2018)

Definisi dan Peran Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terkait dengan pemasukan dan pengeluaran uang. Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Surjaningsih et al., (2012) APBN ini mencakup keputusan pemerintah mengenai cara pengalokasian dan distribusi dana negara. Mengingat pentingnya aspek ini dalam membangun ekonomi negara, kebijakan fiskal juga memengaruhi inflasi.

Penelitian menunjukkan bahwa efek kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi menciptakan kondisi di mana peningkatan pengeluaran pemerintah memberikan dampak positif pada PDB, sedangkan peningkatan pajak menyebabkan penurunan PDB. Hal ini sejalan dengan teori Keynes yang menegaskan peran pemerintah dalam mendorong ekonomi, dan juga cocok dengan studi empiris dari berbagai negara maju. Dominasi pengeluaran pemerintah terhadap PDB dibandingkan dengan pajak menunjukkan bahwa kebijakan ini masih cukup efektif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, terutama selama masa resesi.

Dampak pengeluaran pemerintah terhadap penurunan inflasi mungkin dapat dijelaskan oleh pengaruh multiplikator dari pengeluaran untuk sektor investasi, seperti infrastruktur, yang memiliki dampak lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin. Investasi pemerintah dalam

infrastruktur diyakini bisa memperbaiki distribusi barang dan jasa, sehingga membantu menurunkan inflasi. Dalam kerangka Keynesian, kebijakan fiskal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pengurangan pajak memiliki efek multiplikator yang mendorong permintaan tambahan untuk barang konsumsi oleh rumah tangga.

Sama halnya jika pemerintah memotong pajak sebagai langkah untuk merangsang ekonomi. Pengurangan pajak akan meningkatkan pendapatan yang bisa digunakan dan pada gilirannya memengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan memperbesar kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi (mpc) menciptakan siklus dalam ekonomi yang mendorong pengeluaran lebih besar dan akhirnya berpengaruh pada output. (Eva et al., 2020)

Kebijakan moneter adalah salah satu jenis kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi makro dan dilakukan sesuai dengan siklus ekonomi. Menurut Mishkin pada tahun 2004, kebijakan moneter mencakup semua tindakan atau upaya yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel seperti jumlah uang yang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar. Semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan moneter juga merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang memiliki beberapa tujuan, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga, dan memastikan keseimbangan neraca pembayaran. Hubungan antara kebijakan moneter dan inflasi di Indonesia telah diatur sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 1999 hingga perubahan UU Nomor 6 Tahun 2009. Dalam peraturan tersebut, Bank Indonesia memiliki peran untuk menjaga inflasi dengan mempertahankan stabilitas rupiah, yang berpengaruh pada harga barang dan jasa. Mulai Juli 2005, Bank Indonesia mulai menerapkan kerangka kerja yang dikenal sebagai Inflation Targeting Framework (ITF). ITF adalah suatu sistem kebijakan moneter yang bertujuan untuk mencapai target inflasi yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dari bank sentral. (Wati et al., 2021)

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi literatur (Literatur Review), yakni pendekatan penelitian yang dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan. Studi literatur dipilih karena mampu memberikan pemahaman konseptual dan teoritis yang komprehensif mengenai isu yang diteliti, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan fokus pada penjelasan, pembahasan, dan interpretasi hasil temuan literatur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen tertulis. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, validitas, serta kemutakhiran publikasi. Literatur yang digunakan diutamakan diterbitkan dalam rentang sepuluh tahun terakhir, kecuali untuk teori klasik yang masih dibutuhkan sebagai landasan teoritis.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran database ilmiah menggunakan kata kunci yang disesuaikan dengan topik penelitian. Setelah literatur terkumpul, peneliti melakukan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Setiap sumber kemudian dicatat dan dirangkum untuk memperoleh informasi penting terkait konsep, metode, dan hasil penelitian.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan sintesis temuan. Melalui proses ini, informasi dari berbagai

sumber digabungkan dan diinterpretasikan sehingga membentuk pemahaman yang utuh terhadap isu penelitian. Hasil sintesis literatur menjadi dasar dalam menarik kesimpulan dan menyusun argumen ilmiah dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

Menganalisis Kontribusi Teori Pertumbuhan Ekonomi dalam Merancang Strategi Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kebijakan fiskal memainkan peran krusial dalam memengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Di Indonesia, kebijakan ini mencakup pengelolaan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak, serta penyaluran dana pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,31%, didorong oleh konsumsi domestik dan investasi infrastruktur (Aprianti et al., 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, khususnya melalui belanja produktif, memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi pascapandemi (Latifah & Rosyadi, 2024). Meskipun dampak kebijakan fiskal di Indonesia positif, beberapa tantangan masih ada. Efisiensi belanja pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan masih rendah, terbukti dari alokasi anggaran negara sebesar 20% untuk pendidikan yang tidak sebanding dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Bappenas, 2023b). Lebih lanjut, defisit anggaran yang mencapai 6,31% dari PDB pada tahun 2020 menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal, meskipun dapat dikurangi menjadi 2,84% pada tahun 2023 (Kementerian Keuangan, 2023). Hal ini memerlukan analisis mendalam untuk memastikan kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Beberapa studi telah mengkaji hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi (Ayana, 2022) mencatat bahwa kebijakan fiskal ekspansif efektif dalam mempercepat pemulihan ekonomi pascakrisis, terutama melalui investasi infrastruktur. Sementara itu, penelitian dari Bank Pembangunan Asia (ADB, 2022) menegaskan bahwa peningkatan belanja infrastruktur di Indonesia berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB sebesar 5-6% per tahun. Namun, studi-studi sebelumnya terbatas dalam mengevaluasi efektivitas belanja sektor sosial dan dampak reformasi pajak terkini terhadap pertumbuhan ekonomi.

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mengacu pada pengelolaan pendapatan negara yang berasal dari masyarakat dan diatur oleh pemerintah untuk digunakan dalam berbagai program guna mencapai tujuan ekonomi nasional seperti peningkatan pendapatan, produksi, dan keseimbangan ekonomi. Kebijakan ini merupakan alat penting dalam menentukan arah perekonomian suatu negara. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat memengaruhi kondisi ekonomi dengan menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran negara. Terdapat dua jenis kebijakan fiskal:

a. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan ini digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, terutama selama resesi atau tingkat pengangguran yang tinggi. Pemerintah akan meningkatkan pengeluaran dan/atau mengurangi pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi.

b. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan ini diterapkan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi ketika inflasi terlalu tinggi dengan meningkatkan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Tujuan utama kebijakan fiskal adalah menciptakan sistem ekonomi yang sejahtera, mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas harga. Elemen-elemennya meliputi anggaran berimbang, pembiayaan yang berfungsi menciptakan lapangan kerja, defisit anggaran yang digunakan untuk merangsang ekonomi, surplus anggaran untuk mengurangi tekanan permintaan yang berlebihan, stabilitas anggaran otomatis, dan manajemen anggaran yang menjaga stabilitas ekonomi.

Surplus anggaran bertujuan untuk mengurangi tekanan akibat permintaan yang berlebihan, menjaga stabilitas anggaran secara otomatis, dan mengelola anggaran untuk mendukung stabilitas ekonomi.

Indikator Kebijakan Fiskal

- 1) Kebijakan Perpajakan: Pajak harus seimbang untuk mencegah gangguan daya beli atau meningkatkan inflasi.
- 2) Kebijakan Pengeluaran Pemerintah: Pengeluaran difokuskan pada investasi di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pembayaran utang.

2. Kebijakan Moneter

Bank Sentral bertanggung jawab atas kebijakan moneter, yang mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mencapai stabilitas inflasi dan menjaga sistem keuangan yang sehat. Kebijakan ini berdampak pada sektor riil dan keuangan melalui berbagai saluran seperti jumlah uang beredar, pinjaman, suku bunga, dan nilai tukar.

Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen dibagi menjadi instrumen langsung (seperti penetapan suku bunga, batas kredit, rasio likuiditas, pemberian kredit langsung, dan kuota penebusan surat berharga) dan instrumen tidak langsung (seperti persyaratan cadangan wajib, fasilitas diskonto, dan operasi pasar terbuka).

Indikator Kebijakan Moneter

Ini mencakup suku bunga dan jumlah total uang yang dikendalikan untuk memastikan stabilitas ekonomi. Cara Kerja Kebijakan Moneter

Kebijakan ini diimplementasikan melalui beberapa saluran, termasuk:

- 1) Saluran Suku Bunga, yang berdampak pada aktivitas ekonomi di sektor riil.
- 2) Saluran Nilai Tukar, yang memengaruhi perdagangan internasional dan arus modal.
- 3) Saluran Harga Aset, yang berkaitan dengan nilai obligasi, saham, dan aset fisik.

3. Kebijakan Fiskal dan Moneter di Pasar Berkembang di Asia Pasifik

a. India

Menurut data IMF, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan mencapai 7,5%, didorong oleh kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel untuk secara efisien memenuhi total permintaan. Kebijakan fiskal dan moneter seringkali diimplementasikan secara bersamaan untuk menstabilkan inflasi dan output, meskipun keduanya merespons siklus ekonomi secara berbeda.

b. Indonesia

Di Indonesia, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter belum optimal, terkadang menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi seperti hiperinflasi. Dalam jangka pendek, kedua kebijakan, ekspansif dan kontraksif, dapat mempercepat atau memperlambat pertumbuhan ekonomi, tetapi dampak kebijakan fiskal bersifat jangka pendek.

c. Thailand

Perdebatan mengenai efektivitas kebijakan fiskal dan moneter terus berlanjut. Kebijakan fiskal berkontribusi lebih besar pada hubungan jangka panjang antara defisit fiskal dan neraca transaksi berjalan, sementara kebijakan moneter memiliki dampak yang lebih besar pada stabilitas ekonomi jangka pendek.

d. Malaysia

Manajemen kebijakan fiskal yang baik menjaga defisit anggaran agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi, dengan suku bunga dan inflasi yang stabil, sehingga mencegah sektor riil terancam.

e. Korea Selatan

Pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal diperkirakan akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi, meskipun terdapat risiko perlambatan ekonomi global.

Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran adalah dokumen yang mencatat secara finansial semua transaksi perdagangan dan arus modal antara satu negara dengan negara lain selama satu tahun. Surplus terjadi ketika ekspor dan arus modal masuk melebihi impor dan arus modal keluar, sementara defisit terjadi ketika sebaliknya. Neraca pembayaran mencakup neraca transaksi berjalan, yang mencerminkan perdagangan barang dan jasa, serta pendapatan dari investasi, dan neraca modal, yang mencatat perubahan aset yang dimiliki oleh warga negara di luar negeri. Pendekatan elastisitas neraca pembayaran membahas penyesuaian melalui perubahan harga relatif ekspor dan impor serta nilai tukar. Strategi devaluasi mata uang dapat digunakan untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan meningkatkan elastisitas permintaan dan penawaran di sektor ekspor-impor, sesuai dengan prinsip Marshall-Lerner.

Bagaimana kebijakan moneter dan fiskal dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi

Pemerintah harus mempercepat implementasi kebijakan moneter dan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan berbagai cara, percepatan kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat melalui cara-cara berikut:

1. Peningkatan Investasi. Peningkatan investasi dari pemerintah dan sektor swasta dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing global. Proyeksi investasi Indonesia untuk Triwulan I 2025 menunjukkan pertumbuhan positif. Target investasi untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp1.650 triliun;
2. Peningkatan Daya Beli Masyarakat. Dengan memanfaatkan subsidi, transfer fiskal, dan peningkatan belanja pemerintah, daya beli masyarakat dapat meningkat. Hal ini akan menghasilkan permintaan agregat yang lebih tinggi dan merangsang kegiatan ekonomi. Subsidi untuk meningkatkan daya beli masyarakat ditetapkan sebesar Rp525 triliun pada tahun 2025;
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Investasi di bidang pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang lebih baik akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Anggaran pendidikan dalam APBN 2025 adalah Rp724,26 triliun, sekitar 20% dari total belanja negara;

4. Pembangunan Infrastruktur. Investasi di bidang infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya transportasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan total investasi mencapai Rp1.900 triliun pada tahun 2025.

Meskipun kebijakan fiskal krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, implementasinya harus cermat untuk menghindari masalah seperti inflasi atau peningkatan utang negara. Untuk mempercepat kebijakan fiskal dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, strategi yang terorganisir dan terkoordinasi dengan baik sangatlah penting.

Pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Sebelum menerapkan kebijakan fiskal, berbagai aspek ekonomi dan sosial perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. **KEBIJAKAN MONETER**

Kebijakan moneter merupakan instrumen penting untuk mengelola perekonomian, terutama saat terjadi perlambatan atau resesi. Bank Sentral (Bank Indonesia) bertanggung jawab atas kebijakan ini. Mempercepat kebijakan moneter merupakan langkah efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan:

1. Menurunkan Suku Bunga. Menurunkan suku bunga akan menurunkan biaya pinjaman. Dengan suku bunga yang lebih rendah, Bank Sentral mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk berinvestasi dan berbelanja. Pada Mei 2025, Bank Indonesia menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Suku bunga Deposit Facility juga diturunkan sebesar 25 bps menjadi 4,75%. Sementara itu, suku bunga Lending Facility diturunkan sebesar 25 bps menjadi 6,25%. Suku bunga deposito 1 bulan tetap stabil di angka 4,83% pada April 2025. Kredit memiliki suku bunga sebesar 9,19% pada April 2025.
2. Meningkatkan Jumlah Uang Beredar. Bank Sentral dapat meningkatkan jumlah uang beredar untuk merangsang aktivitas ekonomi dan investasi. Namun, pendekatan ini harus digunakan dengan hati-hati, karena peningkatan yang berlebihan dapat memicu inflasi dan berdampak pada stabilitas ekonomi. Pada Januari 2025, total uang beredar di Indonesia mencapai Rp9.232,8 triliun, meningkat 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Maret 2025, angkanya meningkat menjadi Rp9.436,4 triliun, meningkat 6,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi tercatat sebesar 0,76% pada Januari 2025.

Perekonomian yang tumbuh berkat kebijakan moneter dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Kebijakan moneter yang baik dapat menjaga stabilitas ekonomi, termasuk stabilitas harga dan nilai tukar, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter perlu disinkronkan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika kombinasi kebijakan yang tepat dipilih dan implementasinya dipercepat, pemerintah diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan (Krisprimandoyo & Mahargiono, 2023).

Studi kasus atau contoh implementasi kebijakan yang berhasil dan tantangan yang dihadapi

Dalam situasi

tertentu yang melibatkan Indomie, krisis diakibatkan oleh kesalahan manusia. Krisis manusia adalah situasi kritis atau darurat yang terjadi akibat tindakan manusia yang tidak tepat.

Kejadian ini muncul ketika individu, baik secara sadar maupun tidak, mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang memicu munculnya kondisi berisiko tinggi atau bahkan bencana.

Kesalahan manusia dapat berbentuk sangat beragam, mulai dari penilaian yang keliru hingga tindakan yang dilakukan tanpa pertimbangan dan analisis yang cukup matang. Krisis yang bersumber dari human error bisa terjadi di banyak sektor, seperti lingkungan kerja, sistem transportasi (contohnya kecelakaan kendaraan atau penerbangan), layanan kesehatan (seperti kesalahan dalam prosedur medis), maupun berbagai situasi darurat lainnya. Dalam banyak kasus, keadaan krisis tersebut menuntut respons cepat dan langkah penanggulangan segera agar dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Upaya menangani krisis yang dipicu oleh kesalahan manusia umumnya dilakukan melalui peningkatan kualitas pelatihan, penerapan prosedur kerja yang lebih ketat dan aman, serta pembangunan sistem yang lebih andal untuk mengurangi peluang terjadinya error. Komunikasi yang transparan dan terstruktur serta praktik manajemen krisis yang efektif juga menjadi elemen kunci dalam mengelola keadaan genting yang berawal dari human error. John Reason, salah satu tokoh yang banyak mengkaji kesalahan manusia dalam konteks layanan kesehatan, meneliti berbagai faktor penyebab error medis dan merumuskan pendekatan pencegahan di dalam sistem pelayanan kesehatan. Dalam konteks kasus Indomie, dapat diidentifikasi sejumlah bentuk kesalahan manusia yang relevan untuk dicermati dan dijadikan pembelajaran.

Salah satu indikator kesalahan adalah kurangnya pengawasan oleh individu-individu pengeksportir Indomie, yang gagal mematuhi standar yang seharusnya diawasi secara ketat. Dalam situasi ini, bukan hanya eksportir individu yang terlibat, tetapi Indomie sendiri juga terlibat. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian dan seleksi yang cermat oleh Indomie dalam bekerja sama dengan eksportir yang bertanggung jawab mengeksport produk, terutama ke luar negeri.

Peraturan dan indikator standar pangan setiap negara berbeda dan harus dipatuhi. Dalam kasus Indomie, manajemen krisis melibatkan pihak-pihak terkait dan para ahli di bidangnya. Pihak-pihak tersebut antara lain Kementerian Perdagangan (KEMENDAG), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan media. Pernyataan dari pihak-pihak ini menunjukkan dukungan mereka terhadap Indomie dan meremehkan isu krisis. Pihak-pihak terkait memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses ekspor Indomie secara menyeluruh, sehingga mereka dapat segera memberikan penjelasan yang jelas dan tepat ketika ada informasi yang tersebar.

Di Indonesia, pengawasan ekspor dilaksanakan oleh beberapa lembaga, seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang mendukung pembiayaan dan konsultasi bagi pelaku usaha ekspor, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas memantau pengeluaran barang agar mengikuti peraturan yang berlaku. Selain itu, terdapat koordinasi dengan kementerian terkait yang memastikan bahwa pelaksanaan ekspor berjalan sesuai prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan. Keberadaan lembaga-lembaga ini memungkinkan klarifikasi yang cepat dan akurat atas setiap isu yang muncul terkait kegiatan ekspor Indomie.

Sesuai tugas dan fungsi Kementerian, salah satu peran utamanya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk memperkuat dan memperluas perdagangan domestik, melindungi konsumen, dan menciptakan perdagangan yang efisien.

Hal ini meningkatkan aktivitas perdagangan internasional, meningkatkan akses pasar barang dan jasa di seluruh dunia, mendukung pengembangan perdagangan nasional, dan mendukung sektor perdagangan berjangka komoditas, sistem resi gudang, dan lelang komoditas.

Sejalan dengan fungsi Kementerian Perdagangan, mereka menjalankan tugas ini dengan melakukan pemantauan dan klarifikasi dengan Indomie dan menanggapi isu-isu yang muncul kepada publik, sehingga mengurangi penyebaran informasi yang tidak akurat. Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan juga telah memenuhi perannya sebagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam urusan perdagangan, baik domestik maupun internasional.

Selain Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga berperan penting dalam situasi ini. Tanggung jawab BPOM sebagai badan pengawas obat dan makanan menjadi semakin menantang, mengingat berbagai risiko yang mungkin timbul jika terjadi kesalahan. Dalam pernyataannya, BPOM menyatakan bahwa Indomie memenuhi standar yang berlaku di Indonesia. Informasi ini disampaikan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) karena merupakan tanggung jawab mereka. Dengan pernyataan resmi dari BPOM, masalah ini mulai terselesaikan karena mereka memiliki keahlian di bidang ini untuk memberikan klarifikasi. Pernyataan BPOM memberikan kepastian kepada publik, karena kekhawatiran dan asumsi yang beredar dapat merusak citra Indomie di pasaran. Terakhir, peran media tidak boleh diabaikan. Media memiliki beberapa fungsi, antara lain: Fungsi Informasi, di mana media menyajikan berita dan fakta terkini mengenai berbagai peristiwa dunia, berfungsi sebagai Sebagai proses yang bertahap, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu:

- a. Tahap Pra-Krisis: Organisasi mengambil langkah ini ketika mereka menghadapi situasi kritis untuk pertama kalinya.
- b. Dalam fase ini, tindakan perlu diambil untuk mencegah krisis meningkat ke tahap yang lebih serius. Selama tahap ini, Indomie dapat berupaya untuk lebih cermat memilah dan menerapkan standar spesifik yang lebih ketat untuk kegiatan ekspor, baik domestik maupun internasional, dengan tetap berpegang pada standar yang telah ditetapkan Indomie.
- c. Tahap Krisis Akut: Fase ini terjadi ketika situasi kritis telah teratasi dan kini terlihat oleh publik di luar organisasi. Selama masa ini, organisasi harus bergerak cepat untuk memitigasi dampak negatif krisis.
- d. Pasca-Krisis Tahap: Setelah krisis teratasi, tahap ini dimulai. Selama periode ini, organisasi perlu mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasi dan operasional mereka. Pada tahap ini, tindakan yang dapat diambil antara lain melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keseluruhan sistem dan menganalisis ulang wilayah atau negara tujuan ekspor untuk memastikan regulasi yang berlaku tetap mutakhir. Indomie perlu memulai evaluasi, termasuk menarik seluruh stok yang ada di Taiwan dan mengatasi berbagai masalah yang masih berkembang.

NO	LANGKAH LANGKAH	PENJELASAN
1	Tim Krisis	Pembentukan tim khusus krisis, dimulai dari tim yang menangani pasar Taiwan dan Indonesia, serta melihat lebih dekat situasi terkini.
2	Penilaian Risiko	Telaah dampak kasus ini, dimulai dari dampak negatifnya terhadap kesehatan dan juga dampak negatifnya terhadap kesadaran merek.
3	Komunikasi Internal	Mengevaluasi dan berkomunikasi dengan setiap anggota tim sehingga masalah dapat ditangani secara efektif.
4	Komunikasi Eksternal	Terlibat dalam komunikasi dengan pihak lain, seperti media, masyarakat Taiwan, dan orang lain.
5	Bekerja sama dengan Otoritas	Bekerja sama dengan melibatkan pihak-pihak eksekutif. Dianataranya dapat bekerja sama dengan KEMENDAG sebagai badan yang berfungsi di bidang dagang paktek baik dalam negeri maupun internasional. Selain itu, bekerja sama dengan

		B POM sebagai makanan pengamawan dan juga menggunakan media untuk meningkatkan proses informasi dan mengendalikan perilaku masyarakat yang tidak menentu.
6	Produk Evlaluasi	Untuk mengidentifikasi sumber masalah, lakukan uji laboratorium pada produk.
7	Juru Bicara dan Pelatihan Media	Memilih bicara juru yang dapat memberikan penjelasan yang baik dan mudah dimengerti kepada pers.
8	Pamantauan Media Sosial	Pantau social media and consumer interaction in an active and quick manner.

Implikasi hubungan antara teori dan kebijakan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama dalam proses pembangunan ekonomi adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dapat berdampak buruk bagi lingkungan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan. Dengan kata lain, jika pembangunan ekonomi tidak mempertimbangkan kapasitas alam dan lingkungan, akan muncul permasalahan di kemudian hari.

Konsep pembangunan berkelanjutan telah lama menjadi fokus perhatian para ahli. Namun, istilah "keberlanjutan" baru dikenal dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, perhatian terhadap isu keberlanjutan telah ada sejak Malthus menyatakan keprihatinannya terhadap lahan di Inggris pada tahun 1798 akibat pertumbuhan penduduk yang pesat.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dengan tetap berupaya untuk tidak melampaui kapasitas ekosistem yang menopang kehidupan. Saat ini, isu pembangunan berkelanjutan telah menjadi topik penting untuk meningkatkan kesadaran publik. Tujuan pembangunan berkelanjutan (Musyafak & Darmawan, 2025) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Pembangunan berkelanjutan sejatinya bertujuan mencapai pemerataan pembangunan antara generasi sekarang dan generasi mendatang. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (1990), pembangunan yang pada hakikatnya lebih berorientasi ekonomi, dapat dievaluasi keberlanjutannya dengan menggunakan tiga kriteria. Pertama: tidak terjadi pemborosan sumber daya alam atau penipisan sumber daya alam. Kedua: tidak terjadi pencemaran atau dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Ketiga: kegiatan-kegiatan tersebut harus meningkatkan sumber daya yang dapat digunakan atau digantikan.

Sejalan dengan pemikiran di atas, (Malau et al., 2023) menyatakan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup upaya untuk mencapai

1. Pertama : yaitu pemerataan manfaat pembangunan antargenerasi. Artinya, pemanfaatan sumber daya alam untuk pertumbuhan harus menghormati batas-batas kewajaran sistem ekosistem dan diarahkan pada sumber daya yang dapat digantikan, dengan penekanan pada pengurangan eksploitasi sumber daya yang tidak dapat digantikan.
2. Kedua: melindungi keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan yang ada serta mencegah gangguan terhadap ekosistem untuk menjaga kualitas hidup generasi mendatang.

3. Ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi dengan tujuan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan antargenerasi.
4. Keempat, menjaga kesejahteraan masyarakat, baik saat ini maupun di masa mendatang.
5. Kelima, menjaga manfaat pembangunan atau pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, yang berdampak positif jangka panjang lintas generasi. Keenam, menjaga kualitas hidup manusia lintas generasi yang selaras dengan habitatnya.

Dari perspektif ekonomi, mengemukakan tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan.

Alasan pertama berkaitan dengan tanggung jawab moral. Generasi saat ini memperoleh barang dan jasa dari sumber daya alam dan lingkungan, sehingga secara etis penting untuk menjaga ketersediaan sumber daya tersebut bagi generasi mendatang. Tanggung jawab moral ini mencakup pelarangan ekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan dan menghilangkan kesempatan generasi mendatang untuk menikmati jasa yang sama.

Faktor kedua berkaitan dengan alasan lingkungan. Keanekaragaman hayati, misalnya, memiliki nilai ekologis yang krusial, sehingga kegiatan ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, karena hal ini dapat membahayakan fungsi ekologis.

Faktor ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah alasan ekonomi. Perdebatan mengenai aspek ekonomi ini terus berlanjut karena sulit untuk menentukan apakah kegiatan ekonomi kita saat ini memenuhi kriteria keberlanjutan. Sebagaimana kita ketahui, dimensi ekonomi berkelanjutan cukup kompleks, sehingga pandangan keberlanjutan seringkali terbatas pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi.

berpendapat bahwa dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penting untuk menghindari konflik antara kebutuhan untuk mengeksploitasi sumber daya alam guna mengentaskan kemiskinan dan upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan. Kedua aspek ini harus seimbang. Pembangunan berkelanjutan juga mensyaratkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan penyediaan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa mengorbankan generasi mendatang.

Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, asalkan pertumbuhan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Namun, pada kenyataannya, tingkat produksi yang tinggi seringkali berbarengan dengan kemiskinan yang meluas. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan harus memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan meningkatkan kapasitas produksi dan menyediakan kesempatan yang sama bagi semua individu.

Konsep keberlanjutan sederhana, namun kompleks, dan pemahamannya memiliki banyak dimensi dan variasi. Menurut Heal (Suprayogi et al., 2024), konsep ini mencakup setidaknya dua aspek. Pertama, dimensi waktu, yang menunjukkan pentingnya masa depan dalam pembahasan keberlanjutan. Kedua, dimensi hubungan antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam serta lingkungan.

Hall (1998) menyatakan bahwa asumsi dasar tentang keberlanjutan terdiri dari setidaknya tiga prinsip utama:

- 1) Pengelolaan masa kini dan masa depan yang memberikan nilai positif jangka panjang.
- 2) Kesadaran bahwa aset lingkungan berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi.

- 3) Memahami keterbatasan yang timbul dari konsekuensi yang memengaruhi aset lingkungan. Konsep ini dianggap normatif, sehingga implementasi praktisnya seringkali menghadapi berbagai kendala.

Perman dkk. (1997) menjelaskan lebih lanjut konsep keberlanjutan dengan menawarkan lima definisi alternatif:

- 1) Suatu kondisi dianggap berkelanjutan jika utilitas yang dirasakan masyarakat tetap konstan dari waktu ke waktu dan konsumsi tidak menurun (konsumsi tidak menurun).
- 2) Keberlanjutan berarti sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk mempertahankan peluang produksi di masa depan.
- 3) Keberlanjutan adalah ketika stok sumber daya alam tetap tidak berkurang dari waktu ke waktu (tidak menurun).
- 4) Keberlanjutan adalah ketika sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa yang disediakan.
- 5) Keberlanjutan juga didefinisikan sebagai penciptaan keseimbangan dan ketahanan ekosistem.

Dalam berbagai definisi ini, terdapat prinsip-prinsip dasar mengenai setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Ada empat aspek penting yang harus dipertimbangkan: kesetaraan, keragaman, integrasi, dan visi jangka panjang. Pembangunan yang Mengutamakan Keadilan dan Pemerataan

Pembangunan yang berfokus pada pemerataan dan keadilan sosial harus didasarkan pada faktor-faktor seperti pemerataan distribusi sumber daya lahan dan faktor-faktor produksi, kesempatan yang sama bagi perempuan, dan pencapaian ekonomi yang seimbang dengan distribusi kesejahteraan yang merata. Namun, pemerataan tidak mudah dicapai. Konsep ini relatif dan tidak dapat diukur secara langsung.

Aspek etika pembangunan berkelanjutan mencakup semua aspek, di mana kesenjangan pendapatan antara negara kaya dan miskin semakin melebar, meskipun kesetaraan di berbagai negara semakin meningkat. Aspek etika penting lainnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah kepedulian terhadap generasi mendatang, yang tidak boleh diabaikan demi generasi saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan saat ini harus mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang.

Pembangunan yang Menghargai Keberagaman

Melestarikan keanekaragaman hayati sangat penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk saat ini dan masa depan. Keberagaman ini juga membentuk fondasi bagi keseimbangan ekosistem. Mempertahankan keragaman budaya akan mendorong perlakuan yang adil bagi semua individu dan meningkatkan pemahaman tentang tradisi berbagai komunitas.

Pembangunan dengan Pendekatan Integratif

Pembangunan berkelanjutan menekankan hubungan antara manusia dan lingkungan. Tindakan manusia dapat berdampak positif maupun negatif terhadap alam. Hanya dengan memahami hubungan kompleks antara sistem alam dan sosial, kita dapat mencapai pembangunan yang lebih integratif. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi lembaga-lembaga yang ada.

Pembangunan Membutuhkan Pandangan Jangka Panjang

Masyarakat cenderung lebih berfokus pada masa kini daripada masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan merupakan hal mendasar dalam penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan evaluasi yang berbeda dari yang biasanya terjadi dalam proses

diskontinuitas. Pandangan jangka panjang merupakan cara berpikir dalam pembangunan berkelanjutan. Saat ini, pemikiran jangka pendek masih mendominasi para pengambil keputusan ekonomi, sehingga hal ini perlu ditangani.

Idealnya, keberlanjutan dalam pembangunan membutuhkan pendekatan yang berfokus pada keberlangsungan berbagai aspek kehidupan, termasuk keberlanjutan

5. Kesimpulan

Berdasarkan beragam sumber yang telah diteliti, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari peran kebijakan fiskal dan moneter. Kedua jenis kebijakan ini saling mendukung untuk mempertahankan stabilitas ekonomi secara keseluruhan sekaligus meningkatkan kapasitas produksi negara. Kebijakan fiskal, melalui pengelolaan anggaran pemerintah dan sistem pajak, terbukti efektif dalam mendorong aktivitas ekonomi, terutama jika diarahkan pada sektor-sektor yang produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Di sisi lain, kebijakan moneter bertugas untuk menjaga kestabilan harga, mengatur kuantitas uang yang beredar, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung investasi.

Hasil kajian literatur mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan hanya dapat dicapai jika kebijakan fiskal dan moneter berfungsi secara harmonis, responsif terhadap situasi ekonomi, serta didukung oleh dasar teori yang kokoh—mulai dari teori pertumbuhan klasik, neoklasik, hingga teori pertumbuhan endogen yang menekankan pentingnya inovasi dan kualitas SDM. Kendati demikian, tantangan seperti efisiensi anggaran, ancaman inflasi, ketergantungan pada pinjaman, dan perubahan dinamika ekonomi global tetap perlu diwaspadai.

Pada akhirnya, pendekatan pertumbuhan yang berhasil adalah pendekatan yang tidak hanya fokus pada peningkatan hasil jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, distribusi kesejahteraan yang adil, serta pengelolaan sumber daya untuk masa depan. Kolaborasi antara kebijakan, yang didukung oleh manajemen yang baik, menjadi faktor penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, Y., Muliati, M., & Sulindrina, A. (2023). The Impact of Fiscal Variables on Economic Growth in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 12(1), 71-83.
- Ayana, I. D. (2022). Fiscal policy and economic growth in Sub-Saharan African countries: A systematic review. *Journal of Economic and Business Studies*, 5(1), 1-7.
- Haase, H. (2020). Sustainability and sustainable development. In *Integrated Design Engineering: Interdisciplinary and Holistic Product Development* (pp. 163-220). Springer.
- Krisprimandoyo, D. A., & Mahargiono, P. B. (2023). The Influence of Fiscal Policy and Monetary Policy on Economic Growth in Indonesia.
- Latifah, L. L., & Rosyadi, S. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal Pasca Pandemi Covid-19 Studi Kasus Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1523-1537.
- Malau, L. R. E., Rambe, K. R., Damanik, M., Suli, A. A. T., & Amru, K. (2023). Socio-economic and Environmental Degradation: The Causal Relationship Analysis to Achieve SDGs in Indonesia. *SRICOENV 2022: Proceedings of the 3rd Sriwijaya International Conference on Environmental Issues*, SRICOENV 2022, October 5th, 2022, Palembang, South Sumatera, Indonesia, 181.
- Musyafak, M., & Darmawan, D. (2025). Realizing Just Sustainability through Public Policies Responsive to Social Inequalities. *Proceeding of International Management Conference*

and Progressive Papers, 3(1).

Suprayogi, S., Purnama, L. S., & Darmanto, D. (2024). *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. UGM PRESS.

Eva, D., Silalahi, S., & Kunci, K. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. 3(2), 156-167.

li, B. A. B., & Pustaka, T. (2011). *Pertumbuhan Ekonomi*. 8-19.

Sirly, lestari ugia. (2018). *ANALISIS TEORI - TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI SEBUAH STUDI LITERATUR Skripsi*.

Surjaningsih, N., Utari, G. A. D., & Trisnanto, B. (2012). *Bulletin of Monetary Economics and Banking*. 14(4).

Wati, A., Paramansyah, A., & Damayanthi, D. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2(2), 184-200. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.344>

E, M. S. P. (2024). Evaluasi Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia. 3.

Hakiki¹, A., Suhaimi², B., Mu'ammara³, N., & Dewi Kurniasari. (2024). *ANALISIS KEBIJAKAN MONETER, FISKAL DAN INFLASI PADA PERTUMBUHAN EKONOMI*.

Purwiyanti, T., & Panjawa, J. L. (2022). Peran kebijakan moneter dan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. 7(2).